

BAB V

KESIMPULAN

Koto Besar merupakan sebuah kerajaan rantau Minangkabau yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-17 Masehi. Kerajaan Koto Besar terletak di daerah perbatasan Alam Minangkabau dengan wilayah teritorial Kerajaan Jambi. Bila merujuk pada kondisi hari ini, daerah kekuasaan Kerajaan Koto Besar pada masa dahulunya meliputi wilayah Batang Siat di Kabupaten Dharmasraya, sekarang, seperti: Koto Besar, Bonjol, Abai Siat, Sungai Rumbai, Ampang Kuranji, Koto Baru, Koto Salak dan Ampalu. Kemudian supremasi Kerajaan Koto Besar juga meliputi wilayah Batang Asam dan Jujuhan, seperti : Sinamar, Tanjung Alam, Sungai Limau, Batukangkung di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, Nagari Talao dan Sungai Kunyit di Kabupaten Solok Selatan dan Kecamatan Asam Jujuhan di Kabupaten Bungo, Jambi.

Kerajaan Koto Besar adalah salah satu *balahan sapiah* dari Kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh Tuan Puti Langguk. Sebelum ditaklukkan Belanda pada tahun 1905, Koto Besar adalah sebuah negeri merdeka dan memiliki pengaruh yang besar untuk daerah-daerah di sekitarnya. Sistem pemerintahan yang silih berganti membuat peran dan fungsi Kerajaan Koto Besar mengalami perubahan. Setelah menjadi bagian dari Residen Sumatera Barat pada tahun 1905, Kerajaan Koto Besar hanya berperan sebagai perantara dalam sistem pemerintahan kolonial, yang ditugaskan untuk mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Koto Besar lebih banyak membahas tentang persoalan yang terjadi di tingkat kaum, seperti pengangkatan

penghulu, menentukan batas tanah ulayat antara satu kaum dengan kaum lainnya, serta menyediakan pajak untuk Pemerintah Hindia Belanda. Kondisi yang berlanjut hingga Belanda angkat kaki dari Nusantara.

Dalam dinamikanya, Kerajaan Koto Besar tidak lagi memiliki kekuasaan seperti pada masa lampau. Kerajaan Koto Besar tidak lebih sebagai simbol adat istiadat yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya. Meskipun demikian, dalam berbagai kepentingan, pewaris Kerajaan Koto Besar berperan sebagai pendukung pemerintah dalam melancarkan konsep pembangunan yang dicanangkan di tingkat lokal, seperti pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera (1964-1974), program transmigrasi di Sitiung IV (1976-1980), penerapan sistem pemerintahan desa (1983-2002), hingga menjadi pendukung setia Partai pemerintah Orde Baru.

Munculnya era reformasi dan otonomi daerah menjadi pintu pembuka bagi pewaris Kerajaan Koto Besar untuk mengukuhkan perannya di tingkat lokal Kabupaten Dharmasraya yang selama ini berada dibawah bayang-bayang rezim Orde Baru. Hal ini dibuktikan dengan pengembalian identitas wilayah adat Kerajaan Koto Besar yang sempat diubah di wilayah desa eks transmigrasi, pengenalan kembali sejarah Kerajaan Koto Besar, dan mengangkat *datuak-datuak* baru untuk para pendatang, terutama di daerah Sungai Rumbai. Selain itu, pewaris Kerajaan Koto Besar juga ikut mengambil posisi dalam pemekaran daerah Kabupaten Dharmasraya, seperti melalui pemangku adatnya Sutan Darman Tuanku Kerajaan dan Sutan Hidayat, serta ninik mamak dalam wilayah adat Kerajaan Koto Besar, seperti Rasul Hamidi Datuk Sari Dano.

Setelah terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, pewaris Kerajaan Koto Besar semakin memperlihatkan perannya. Pewaris Kerajaan Koto Besar ikut berkontestasi dalam berbagai ajang demokrasi dalam lingkup lokal Kabupaten Dharmasraya. Pewaris Kerajaan Koto Besar tampil dengan segala kelebihan dan modalitas yang dimiliki, seperti modal ekonomi, modal politik, modal sosial, modal simbolik dan modal budaya. Pada tahun 2004-2009, Kerajaan Koto Besar mengirim dua pewarisnya ke kursi legislatif Kabupaten Dharmasraya, yaitu Sutan Darman dan Aprisal Tuanku Rajo Dipati. Pada periode ini Sutan Darman juga terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Puncak dari keragaman peran pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya terjadi pada tahun 2015, ketika Sutan Riska Tuanku Kerajaan tampil sebagai kandidat bupati Kabupaten Dharmasraya. Pencalonan diri Sutan Riska mendapat respon positif dari berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, seperti tokoh adat, ninik mamak, tokoh politik dan masyarakat *badarai*. Sutan Riska berhasil menumbangkan kandidat petahana menuju kursi bupati Kabupaten Dharmasraya, serta menorehkan rekor sebagai kepala daerah termuda dalam sepanjang demokrasi di Indonesia.